

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT *TAX KNOWLEDGE* DAN
GENDER TERHADAP *TAX COMPLIANCE*: STUDI
KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI BANDUNG**

Ketua Peneliti:

Debbianita, S.E.

Anggota Peneliti:

Verani Carolina, S.E., M.Ak., Ak.



**JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG**

2013

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian: Analisa Pengaruh Tingkat *Tax Knowledge* dan *Gender* Terhadap *Tax Compliance*: Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung
2. Jumlah Peneliti: 2 orang
3. Fakultas/Jurusan: Ekonomi/Akuntansi
4. Pusat/Bidang Studi: Akuntansi
5. Tim Peneliti
 - a. Debbianita, S.E. : 510734
 - b. Verani Carolina, S.E., M.Ak., Ak.: 510717
6. Lokasi Penelitian: Bandung
7. Sumber Dana Penelitian: Universitas Kristen Maranatha
8. Biaya Penelitian: Rp 5.474.500
9. Lama Penelitian: Desember 2012-April 2013

Bandung, April 2013
Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Se Tin, S.E., M.Si., Ak.

Hanny, S.E., M.Si., Ak.

Mengetahui
Ketua LPPM,

Prof. Dr. Ir. Benjamin Soenarko, MSME.

ABSTRACT

This research aims to examine whether tax knowledge and gender influence on Individual Taxpayer compliance. Tax compliance is a major issue due to Self Assessment System. Taxpayers granted with trust from the Government to fulfill his tax duties. So that in this system, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) are the controller. In accordance to voluntary principle, it is necessary to make taxpayers have a voluntary compliance. Tax knowledge and gender are one of the factor contributed in determining taxpayers behavior. This research performed by distributing questionnaires to Individual Taxpayer in Bandung. Data was processed using ANOVA and the results show that tax knowledge have an impact on Individual Taxpayers compliance. In addition, gender also affect Individual Taxpayers compliance, but tax knowledge are not interact with gender in influencing Individual Taxpayers compliance. The importance of tax knowledge can be acted by organizing the continuous socializations, tax illuminations, seminars, workshops, etc.

Keywords: Tax Knowledge, Gender, and Tax Compliance.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tingkat *tax knowledge* dan *gender* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Kepatuhan pajak merupakan isu utama dari penerapan *Self Assessment System* (SAS). Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dalam SAS, DJP berperan sebagai pengawas. Dalam SAS prinsip kesukarelaan (kepatuhan sukarela) menjadi hal yang sangat penting. *Tax knowledge* dan *gender* adalah salah satu faktor yang menentukan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada WPOP di Bandung. Data dianalisis dengan menggunakan ANOVA dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat *tax knowledge* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak WPOP. *Gender* juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak WPOP, akan tetapi *gender* dan tingkat *tax knowledge* tidak memiliki interaksi dalam memengaruhi kepatuhan pajak WPOP. Pentingnya *tax knowledge* dalam memengaruhi kepatuhan dapat ditindaklanjuti oleh DJP melalui sosialisasi berkelanjutan, penyuluhan pajak, seminar dan pelatihan perpajakan, dsb.

Kata Kunci: *Tax Knowledge*, *Gender*, dan Kepatuhan Pajak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN.....	ii
ABSTRACT.....	iii
INTISARI.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Kontribusi Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	7
2.1 <i>Tax Knowledge</i>	7
2.2 <i>Tax Compliance</i>	9
2.3 <i>Tax Compliance dan Gender</i>	11
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Teknik Pengambilan Sampel.....	13
3.2 Pengukuran Variabel Operasional.....	14
3.3 Metode Analisis Data.....	15
3.4 Pengujian Normalitas.....	16
3.5 Pengujian Validitas.....	17

3.6 Pengujian Reliabilitas.....	17
BAB IV HASIL EMPIRIS.....	18
4.1 Karakteristik Responden.....	18
4.2 Pengujian Normalitas.....	18
4.3 Pengujian Validitas.....	19
4.4 Pengujian Reliabilitas.....	20
4.5 Pengujian Hipotesis.....	20
BAB V SIMPULAN.....	23
5.1 Simpulan dan Saran.....	23
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	27
Tabel 4.2 Identifikasi Responden Berdasarkan <i>Gender</i>	27
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Normalitas.....	27
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas.....	28
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas.....	19
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Reliabilitas.....	29
Tabel 4.7 Hasil Pengujian <i>Homogeneity of Variance</i>	29
Tabel 4.8 Hasil Pengujian <i>ANOVA</i>	30
Tabel 4.9 Kuesioner Penelitian.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerapan *Self Assessment System* di Indonesia membuat tanggung jawab Wajib Pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak (*tax compliance*) semakin memegang peranan dalam upaya efektivitas berjalannya *Self Assessment System*.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/ perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktek sulit untuk membedakan apakah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan adalah pemahaman wajib pajak melalui pendidikan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006: 89). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Gender merupakan salah satu faktor yang menarik untuk diteliti terkait kepatuhan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa Wajib Pajak wanita akan patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan Wajib Pajak pria lebih menekankan pada ketakutan pada sanksi yang diberlakukan.

Sebuah penelitian menyatakan bahwa *gender* adalah salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi *tax compliance* dan perilaku dari Wajib Pajak (Jackson and Milliron, 1986). Selain itu, hal menarik ditemukan dalam penelitian yang menyatakan bahwa perbedaan *gender* membuat *tax knowledge* mempengaruhi *tax attitude* Wajib Pajak dengan cara yang berbeda (Fallan, 1999).

Kasipillai and H. A. Jabbar (2006) menyatakan bahwa *gender* merupakan faktor mikro di luar dari sistem perpajakan yang memengaruhi ketidakpatuhan pajak seseorang. Terkait dengan tingkat *tax compliance* berdasarkan *gender*, penelitian Fallan (1999) memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan perilaku kepatuhan pajak dari Wajib Pajak pria dengan Wajib Pajak wanita, namun perbedaan ini tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian Jackson and Milliron (1986) yang menyatakan bahwa *gender* adalah salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi *tax compliance* dan perilaku dari Wajib Pajak.

Dengan demikian, *tax knowledge* merupakan hal yang perlu menjadi bahan perhatian di dalam *Self Assessment System* yaitu dalam upaya membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Aspek *gender* juga merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan sehubungan dengan perilaku Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Kasipillai and H. A. Jabbar (2006) di Malaysia ditambah dengan variabel yang digunakan Fallan (1999) yaitu *tax knowledge*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat *tax knowledge* dan *gender* berpengaruh terhadap *tax compliance*. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha dimana berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2011 bahwa penerimaan PPh masih didominasi dari Wajib Pajak Badan, sementara WPOP masih kecil. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut dalam meningkatkan optimalisasi PPh yang berasal dari WPOP.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diungkapkan, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung tingkat *tax knowledge* pada *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung *gender* pada *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah terdapat interaksi antara tingkat *tax knowledge* dengan *gender* dalam memengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh langsung tingkat *tax knowledge* pada *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh langsung *gender* pada *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Untuk mengkaji apakah terdapat interaksi antara tingkat *tax knowledge* dengan *gender* dalam memengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Dapat menjadi masukan bagi pihak DJP dalam menyusun kebijakan perpajakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mendorong terciptanya *voluntary tax compliance*.
2. Dapat menjadi masukan bagi pihak institusi pendidikan sehubungan dengan penyebaran informasi perpajakan terkait *tax knowledge*.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai *tax compliance* cukup banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian tersebut mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak, khususnya dari faktor terkait DJP seperti pelayanan dan fasilitas yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak, maupun peraturan-peraturan yang dibuat DJP. Akan tetapi, penelitian yang mengkaji dari faktor yang terdapat dalam Wajib Pajak itu sendiri belum banyak dilakukan.

Penelitian ini mencoba mengkaji faktor-faktor seperti tingkat *tax knowledge* dan *gender* dalam memengaruhi perilaku kepatuhan pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebaik atau seadil apapun peraturan perpajakan yang dibuat DJP namun apabila Wajib Pajak tidak memiliki tingkat pemahaman yang cukup akan hal tersebut, maka hal ini tidak akan membuat perilaku kepatuhan pajak Wajib Pajak berubah. Selain itu, *gender* merupakan faktor lainnya yang menarik untuk dikaji terkait dengan perilaku kepatuhan pajak.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bukti empiris mengenai *tax compliance* yang lebih dalam, terutama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek penelitiannya, di mana Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan subjek yang memiliki potensial besar dalam menyumbang penerimaan perpajakan di Indonesia. Selain itu, tidak seperti Wajib Pajak Badan yang kewajiban perpajakannya sudah terorganisir dengan baik, maka penelitian ini dikhususkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melihat tingkat *tax knowledgenya* dalam memengaruhi perilaku kepatuhannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam lima bab, yaitu:

- Bab I: Merupakan pendahuluan yang menguraikan alasan/latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kontribusi penelitian.
- Bab II: Merupakan tinjauan literatur yang melandasi pembentukan hipotesis penelitian yang akan diuji.
- Bab III: Menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi sampel, data, sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, model dan analisis statistik.
- Bab IV: Menjelaskan analisis yang akan dilakukan untuk menguji hipotesis serta membahas hasil pengolahan data.
- Bab V: Simpulan, keterbatasan serta pengembangan penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Tax Knowledge*

Kurangnya pemahaman terhadap hukum pajak merupakan salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak (Abuyamin, 2010), terutama sejak pemberlakuan *Self Assessment System*. Wajib Pajak dituntut untuk aktif dalam memperbaharui dan memahami peraturan perpajakan sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa pengertian *tax knowledge* menurut para ahli antara lain:

1. Loo *et al.*(2009) menyatakan:

“tax knowledge refers to a taxpayer’s ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability”.

2. Fallan (1999) menyatakan:

“Tax knowledge combines information about tax rules with financial knowledge to calculate economic consequences for taxpayers”.

Roshidi *et al.*(2007) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik dalam hal-hal yang menekankan hukum perpajakan, peran pajak dalam pembangunan nasional, dan khususnya dalam hal bagaimana dan kemana uang pajak yang dikumpulkan itu digunakan oleh pemerintah. Pemahaman perpajakan akan menghasilkan perilaku positif Wajib Pajak sehingga mereka akan mengurangi tindakan dalam menghindari pajak.

Dengan demikian *tax knowledge* adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penerapan *Self Assessment System* membuat *tax knowledge* merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi (Palil, 2005).

Menurut pengamatan Norman D. Nowak (dalam Zain, 2007), peningkatan penerimaan pajak akibat verifikasi aparat perpajakan, aktivitas para ahli hukum, para akuntan serta teknisi lainnya dan keputusan peradilan pajak, biasanya hanya merupakan 3% - 5% dari seluruh penerimaan pajak, sedangkan sisanya sebesar 95% adalah hasil dari pengembangan iklim perpajakan. Adapun iklim perpajakan tersebut bercirikan hal-hal di bawah ini:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menghitung pajak dengan benar, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan tepat, serta membayar dan melapor pajak terutang tepat waktu, Wajib Pajak haruslah memahami ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini lebih efektif meningkatkan penerimaan pajak dibandingkan melalui serangkaian pemeriksaan pajak.

Dari berbagai pemahaman yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kewajiban pajak dengan patuh, Wajib Pajak membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan/peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang dinyatakan tidak patuh belumlah tentu karena Wajib Pajak tersebut sengaja melanggar peraturan yang ada, namun karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian Wajib Pajak mengenai suatu peraturan pajak sehingga Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang tidak benar. *Self assessment system* membuat *tax knowledge* memainkan peran yang sangat penting bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2 Tax Compliance

Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli mengenai *tax compliance* adalah sebagai berikut:

1. James and Alley (dalam Simanjuntak, 2008) mengemukakan pengertian *tax compliance* sebagai berikut:

“The definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of compliance can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of society as reflected in tax policy”.
2. James and Nobes (dalam Simanjuntak, 2008) mendefinisikan *tax compliance* yaitu

“the degree of compliance with tax law and administration without the need for enforcement activity”

3. Santoso (2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Hasseldine dalam Kasipillai and H. A. Jabbar (2006) telah banyak usaha yang telah dilakukan untuk mengukur tingkat ketidakpatuhan (*non-compliance*) dari Wajib Pajak dan seringkali kepatuhan pajak bergantung pada perilaku sosial dan aspek-aspek perilaku lainnya dari Wajib Pajak. Lebih lanjut, tingkat ketidakpatuhan pada Wajib Pajak Orang Pribadi tidak hanya tergantung pada faktor-faktor individu tetapi juga keadaan sekitarnya.

Ketidakpatuhan pajak merupakan kegagalan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Ketidaksengajaan dicerminkan dalam perlawanan pasif seperti perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan kesengajaan dicerminkan pada perlawanan aktif yang terdiri dari 1) *tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang; 2) *tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak (Mardiasmo, 2011).

Secara umum, bentuk-bentuk dari ketidakpatuhan pajak adalah sebagai berikut (Kasipillai and H. A. Jabbar, 2006):

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Memperkecil (*understatement*) pendapatan/penghasilan.
3. Memperbesar (*overstatement*) beban.
4. Tidak membayar pajak terutang tepat waktu.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *tax compliance* tidak dapat dipisahkan dari prinsip *voluntary* atau prinsip kesukarelaan. Dengan demikian *tax compliance* merupakan kesadaran (tanpa ada paksaan maupun rasa takut karena sanksi) dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang disertai dengan tindakan untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Tax Compliance dan Gender

Gender merupakan salah satu faktor yang menarik untuk diteliti terkait kepatuhan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa Wajib Pajak wanita akan patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan Wajib Pajak pria lebih lebih menekankan pada ketakutan pada sanksi yang diberlakukan.

Kasipillai and H. A. Jabbar (2006) menyatakan bahwa *gender* merupakan faktor mikro di luar dari sistem perpajakan yang memengaruhi ketidakpatuhan pajak seseorang. Terkait dengan tingkat *tax compliance* berdasarkan *gender*, penelitian Fallan (1999) memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan perilaku

kepatuhan pajak dari Wajib Pajak pria dengan Wajib Pajak wanita, namun perbedaan ini tidak terlalu signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian Jackson and Milliron (1986) yang menyatakan bahwa *gender* adalah salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi *tax compliance* dan perilaku dari Wajib Pajak.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Dari uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H₀₁: Tidak terdapat pengaruh langsung tingkat *tax knowledge* pada *tax compliance*.

H_{a1}: Terdapat pengaruh langsung tingkat *tax knowledge* pada *tax compliance*.

2. H₀₂: Tidak terdapat pengaruh langsung *gender* pada *tax compliance*.

H_{a2}: Terdapat pengaruh langsung *gender* pada *tax compliance*.

3. H₀₃: Tidak terdapat interaksi antara tingkat *tax knowledge* dengan *gender* dalam memengaruhi *tax compliance*.

H_{a3}: Terdapat interaksi antara tingkat *tax knowledge* dengan *gender* dalam memengaruhi *tax compliance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kota Bandung. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan kelompok sampel yang akan diambil yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di daerah Bandung Barat dengan pertimbangan di daerah tersebut terdapat banyak kumpulan Wajib Pajak Orang Pribadi yang beberapa waktu lalu telah dilakukan sensus pajak.

Objek dalam penelitian ini adalah tingkat *tax knowledge*, *gender*, dan *tax compliance*, dengan subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi dipilih menjadi subjek penelitian karena:

1. Wajib Pajak Badan pada umumnya menggunakan konsultan untuk menangani kewajiban perpajakannya.
2. Keputusan yang berkenaan dengan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak Badan tidak hanya ditangani oleh satu pihak melainkan oleh kelompok seperti dewan komisaris, dsb.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi masih menjadi potensi besar dalam penerimaan pajak Indonesia, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi DJP.

3.2 Pengukuran Variabel Operasional

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax compliance*. Seperti yang telah dijelaskan pada teori yang ada, adapun konsep dari *tax compliance* menurut James & Nobes dalam Simanjuntak (2008) adalah sebagai berikut:

“...the degree of compliance with tax law and administration without the need for enforcement activity”

Konsep di atas menekankan pada tingkat kepatuhan tanpa perlu adanya aktivitas/tindakan pemaksaan. Beberapa penelitian mengenai *tax compliance* menemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi seseorang menjadi tidak patuh adalah tarif pajak yang tinggi, peluang terdeteksi atau peluang dilakukannya pemeriksaan, kompleksitas atau rumitnya peraturan perundang-undangan, dan metode pengumpulan pajak. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan 11 butir pernyataan mengenai *non-compliance attitude* yang diadaptasi dari penelitian Kasipillai and H. A. Jabbar (2006) di Malaysia, di mana di dalam pertanyaan tersebut terdapat empat faktor utama seperti yang telah disebutkan. Penelitian Kasipillai and H. A. Jabbar (2006) menggunakan 15 butir pernyataan, kemudian untuk penelitian ini disesuaikan kembali sehingga menjadi 11 butir pernyataan.

Kesebelas butir pernyataan tersebut menggunakan skala likert 1-7, dengan kata lain responden dapat memberikan nilai pada setiap pernyataan berkisar antara 1-7. Nilai 1 diberikan apabila responden sangat setuju dan nilai 7 diberikan apabila responden sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax knowledge* dan *gender*. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan *personal tax compliance* yang terjadi pada Wajib Pajak di Malaysia setelah menerima studi pajak selama satu semester (Kasipillai *et al.*, 2003), serta terdapat perbedaan *tax compliance* yang signifikan antara responden yang memiliki pengetahuan tentang pajak penghasilan dengan responden yang tidak memiliki pengetahuan tersebut (Roshidi *et al.*, 2007), maka *tax knowledge* diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan pemberian kode 1 untuk “SMA”, 2 untuk “S1”, dan 3 untuk “S2”. Sedangkan untuk *gender* menggunakan skala nominal dengan pemberian kode 1 untuk “Pria” dan 2 untuk “wanita”.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis *Analysis of Variance* (ANOVA) dengan menggunakan SPSS 16. ANOVA merupakan metode untuk mengkaji hubungan antara satu variabel dependen yang berbentuk metrik dengan satu atau lebih variabel independen yang berbentuk non-metrik atau kategorial. Sebelum melakukan analisis data menggunakan ANOVA perlu dilakukan pengujian asumsi *homogeneity of variance*. Pengujian asumsi *homogeneity of variance* dilakukan untuk memastikan bahwa sebelum dilakukan pengujian ANOVA, variabel dependen memiliki varians yang sama (tidak berbeda) dalam setiap kategori variabel independen (Ghozali, 2006). Dengan demikian, hipotesis dari pengujian ini adalah:

- H₀: Tidak terdapat perbedaan tingkat *tax compliance* berdasarkan tingkat *tax knowledge* dan *gender*.
- H_a: Terdapat perbedaan tingkat *tax compliance* berdasarkan tingkat *tax knowledge* dan *gender*.

Keputusan untuk menerima H₀ antara lain dengan membandingkan nilai sig. dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Terima H₀ apabila nilai sig. $> \alpha$.

3.4 Pengujian Normalitas

Kerlinger (1990:463) menyatakan asumsi paling terkenal yang melatarbelakangi penggunaan banyak statistik parametrik ialah asumsi normalitas. Ketika uji normalitas dilakukan terhadap data penelitian, dan jika hasilnya menunjukkan bahwa data penelitian yang digunakan berdistribusi secara normal, maka hal itu akan semakin meningkatkan keyakinan terhadap sampel penelitian yang digunakan.

Menurut Ghozali (2006:110), uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ = Data residual berdistribusi normal.

H_a = Data residual tidak berdistribusi normal.

Adapun syarat penerimaan dan penolakan hipotesis tersebut adalah apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> \alpha$, maka H₀ diterima atau dengan kata lain data berdistribusi normal. Di mana $\alpha = 5\%$.

3.5 Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, atau dengan kata lain validitas ingin mengukur apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2006).

Keputusan pada sebuah butir pertanyaan dapat dianggap valid dapat dilakukan dengan cara:

- Jika koefisien korelasi product moment $> r$ tabel (α ; $n-2$)
- Nilai sig. $\leq \alpha$

(Suliyanto, 2005)

3.6 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ukuran yang harus terpenuhi agar suatu instrumen dikatakan reliabel, antara lain memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,6$ (Ghozali, 2006).

BAB IV

HASIL EMPIRIS

4.1 Karakteristik Responden

Kuesioner yang berhasil disebar dan diperoleh adalah 118 kuesioner. Akan tetapi, hanya 109 kuesioner yang berhasil diolah dikarenakan ketidaklengkapan pengisian. Dari 109 kuesioner yang diolah 65 responden berpendidikan SMA, 42 responden berpendidikan S1, dan 2 orang berpendidikan S2. Sedangkan dari sisi *gender*, responden pria berjumlah 92 dan responden wanita berjumlah 17. Identifikasi responden ini disajikan pada tabel 4.1 dan 4.2 dalam lampiran.

4.2 Pengujian Normalitas

Menurut Ghozali (2006:110), uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 = Data residual berdistribusi normal.

H_a = Data residual tidak berdistribusi normal.

Adapun syarat penerimaan dan penolakan hipotesis tersebut adalah apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > α , maka H_0 diterima atau dengan kata lain data berdistribusi normal. Di mana $\alpha = 5\%$.

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov yang disajikan pada tabel 4.3 (dalam lampiran) menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Oleh

karena itu, penelitian ini dapat menggunakan pengujian parametrik serta dapat dilanjutkan pada pengujian berikutnya.

4.3 Pengujian Validitas

Ukuran untuk mengukur valid atau tidaknya suatu instrumen atau kuesioner dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai r (korelasi) hitung dengan r tabel. r tabel diperoleh dari rumus *degree of freedom* (df) = $n - 2$, dimana n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2006:45). Sedangkan r hitung diperoleh dari hasil statistik spss. Apabila r hitung $>$ r tabel maka kuesioner yang dibuat adalah valid.

Nilai r tabel yang diperoleh dengan jumlah sampel 109 adalah 0,1865, sedangkan nilai r hitung seperti yang disajikan pada tabel 4.4 (dalam lampiran) menunjukkan bahwa semua pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan adalah valid. Berikut ini disajikan rangkuman hasil pengujian validitas:

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Validitas

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Simpulan
1	0,413	0,1865	Valid
2	0,539		Valid
3	0,376		Valid
4	0,516		Valid
5	0,555		Valid
6	0,511		Valid
7	0,387		Valid
8	0,414		Valid
9	0,483		Valid
10	0,400		Valid
11	0,437		Valid

4.4 Pengujian Reliabilitas

Ukuran yang harus terpenuhi agar suatu instrumen dikatakan reliabel, antara lain memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,6$ (Ghozali, 2006:41). Hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.6 (dalam lampiran) menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,620. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah reliabel.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Pengujian *Homogeneity of Variance*

Pengujian asumsi *homogeneity of variance* dilakukan untuk menunjukkan bahwa variabel dependen memiliki varians yang sama dalam setiap kategori variabel independen (Ghozali, 2006). Pengujian ini perlu dilakukan sebelum melakukan pengujian ANOVA, dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat perbedaan tingkat *tax compliance* berdasarkan tingkat *tax knowledge* dan *gender*.

H_a: Terdapat perbedaan tingkat *tax compliance* berdasarkan tingkat *tax knowledge* dan *gender*.

Keputusan untuk menerima H₀ antara lain dengan membandingkan nilai sig. dengan tingkat signifikasi $\alpha = 0,05$. Terima H₀ apabila nilai sig. $> \alpha$. Dari hasil pengolahan data (tabel 4.7 dalam lampiran) diperoleh nilai sig. $0,195 > 0,05$, maka H₀ diterima. Dengan demikian, dalam penelitian ini uji asumsi *homogeneity of variance* telah terpenuhi dan dapat dilanjutkan dengan pengujian ANOVA.

4.5.2 Pengujian ANOVA

Hipotesis yang akan diuji dengan pengujian ini antara lain:

1. H_{01} : Tidak terdapat pengaruh langsung tingkat *tax knowledge* pada *tax compliance*.

H_{a1} : Terdapat pengaruh langsung tingkat *tax knowledge* pada *tax compliance*.

Kriteria penerimaan H_{01} antara lain jika nilai sig. $> \alpha = 0,05$. Dari hasil penelitian (tabel 4.8 dalam lampiran), diperoleh nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung tingkat *tax knowledge* pada *tax compliance*.

Sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu bahwa terdapat pengaruh *tax knowledge* pada *tax compliance*. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat *tax knowledge* Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di daerah Bandung ternyata memengaruhi prilakunya sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Secara deskriptif (tabel 6 lampiran), semakin tinggi tingkat *tax knowledge* Wajib Pajak Orang Pribadi, semakin tinggi perilaku untuk patuh.

2. H_{02} : Tidak terdapat pengaruh langsung *gender* pada *tax compliance*.

H_{a2} : Terdapat pengaruh langsung *gender* pada *tax compliance*.

Kriteria penerimaan H_{02} antara lain jika nilai sig. $> \alpha = 0,05$. Dari hasil penelitian (tabel 4.8 dalam lampiran), diperoleh nilai sig. $0,017 < 0,05$, maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung *gender* pada *tax compliance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jackson and Milliron (1986) yang menyatakan bahwa *gender* adalah salah satu faktor yang secara signifikan memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Secara deskriptif (tabel 6 lampiran), responden wanita memiliki perilaku untuk patuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden pria. Hal ini sejalan dengan penelitian Fallan (1999) yang memberikan hasil yaitu skor responden wanita lebih tinggi daripada skor pria. Dikemukakan oleh Fallan (1999) bahwa responden wanita cenderung memiliki rasa etis yang lebih besar dibandingkan responden pria.

3. H₀₃: Tidak terdapat interaksi antara tingkat *tax knowledge* dengan *gender* dalam memengaruhi *tax compliance*.

H_{a3}: Terdapat interaksi antara tingkat *tax knowledge* dengan *gender* dalam memengaruhi *tax compliance*.

Kriteria penerimaan H₀₃ antara lain jika nilai sig. > $\alpha = 0,05$. Dari hasil penelitian (tabel 4.8 dalam lampiran), diperoleh nilai sig. $0,152 > 0,05$, maka H₀₃ diterima dan H_{a3} ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara tingkat *tax knowledge* dengan *gender* dalam memengaruhi *tax compliance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata tingkat *tax knowledge* tidak saling berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa responden wanita dengan tingkat *tax knowledge* yang tinggi akan menghasilkan perilaku yang lebih patuh, dan sebaliknya.

BAB V

SIMPULAN

5.1 Simpulan dan Saran

Simpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Terdapat pengaruh langsung tingkat *tax knowledge* pada *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung.
2. Terdapat pengaruh langsung *gender* pada *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung.
3. Tidak terdapat interaksi antaratingkat *tax knowledge* dengan *gender* dalam memengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung.

Hasil penelitian telah menunjukkan pentingnya *tax knowledge* sebagai bagian dari *Self Assessment System*. Wajib Pajak yang tidak patuh mungkin saja dikarenakan karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup baik tentang peraturan perpajakan maupun kebijakan yang dibuat pemerintah. Hal yang dapat dilakukan Pemerintah melalui DJP antara lain melalui sosialisasi, penyuluhan, seminar, dll.

Sesuai dengan yang dikemukakan para ahli mengenai pentingnya kegiatan sosialisasi. Menurut Hutagaol (2007) penyuluhan perpajakan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat memahami dan mampu untuk memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Burton (2009) menyebutkan bahwa seminar dan lokakarya merupakan salah satu strategi paling

dinamis dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak yang dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Selain itu, DJP juga dapat menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan terkait dengan penyebaran pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Kerja sama berupa pendirian *tax center* di universitas-universitas di Indonesia dapat membantu DJP dalam upaya sosialisasi peraturan dan kebijakan perpajakan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah area penelitian yang masih terbatas, sehingga diharapkan adanya penelitian-penelitian yang lebih luas lagi. Selain itu, diharapkan akan ada penelitian-penelitian di Indonesia mengenai *compliance* dengan memasukkan variabel-variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2010. *Perpajakan Pusat & Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carolina, V. Dan T. H. Simanjuntak. 2011. Pengaruh Tax Knowledge dan Persepsi Tax Fairness terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung. *Prosiding Seminar Nasional "Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)"*: 205-215.
- Fallan, L. 1999. Gender, Exposure to Tax Knowledge and Attitudes towards Taxation: An Experimental Approach. *Journal of Business Ethics* 18(2): 173-184.
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jackson, B. R. and Milliron, V. C. 1986. Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. *Journal of Accounting Literature* 5: 125-165.
- Kasipillai, J., Aripin, N., and Amran, N. A. 2003. The Influence Of Education On Tax Avoidance And Tax Evasion. *eJournal of Tax Research* 1 (2): 134-146.
- Kasipillai, J., and H. A. Jabbar. 2006. Gender and Ethnicity Differences In Tax Compliance. *Asian Academy of Management Journal* 11 (2): 73-88.
- Kerlinger, F. N. 1990. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Loo, E. C., Mckerchar M, and Hansford Ann. 2009. Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. *Journal of the Australasian Tax Teachers Association* 4 (1): 181-202.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Palil, M. R. 2005. Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7 (1): 11-21.

- Roshidi, M. A., Mustafa, H. and Asri, M. 2007. The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers. eprints.uum.edu.my/42/1/Hajah_Mustafa_bin_Mohd._Hanefah.
- Santoso, Wahyu. 2008. Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Keuangan Publik* 5 (1): 85-137.
- Simanjuntak, T. Hamonangan. 2008. *Analisis Kepatuhan Pajak dan Dampaknya Pada Dana Perimbangan Keuangan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Disertasi Doktor. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Simanjuntak, T. Hamonangan, dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Suliyanto. 2005. *Analisis Data Dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Tabel 4.1
Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik	Jumlah
SMA	65
S1	42
S2	2
Total	109

Tabel 4.2
Identifikasi Responden Berdasarkan *Gender*

Karakteristik	Jumlah
Pria	92
Wanita	17
Total	109

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		NTC
N		109
Normal Parameters ^a	Mean	3.3962
	Std. Deviation	.79393
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		.616
Asymp. Sig. (2-tailed)		.843
a. Test distribution is Normal.		

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Validitas

		Correlations											
		NTC1	NTC2	NTC3	NTC4	NTC5	NTC6	NTC7	NTC8	NTC9	NTC1 0	NTC1 1	NTC
NTC1	Pearson Correlation	1	.098	.084	.204*	.207*	.117	.180	.151	.116	-.021	-.057	.413**
	Sig. (2-tailed)		.311	.386	.034	.031	.227	.062	.117	.230	.829	.554	.000
	N	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC2	Pearson Correlation	.098	1	.272**	.271**	.307**	.206*	-.038	.221*	.247**	.062	.011	.539**
	Sig. (2-tailed)	.311		.004	.004	.001	.031	.697	.021	.010	.524	.907	.000
	N	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC3	Pearson Correlation	.084	.272**	1	.333**	.123	.061	-.070	-.068	.080	-.041	.071	.376**
	Sig. (2-tailed)	.386	.004		.000	.202	.528	.471	.479	.406	.674	.464	.000
	N	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC4	Pearson Correlation	.204*	.271**	.333**	1	.259**	.165	.131	.086	.096	-.009	.083	.516**
	Sig. (2-tailed)	.034	.004	.000		.006	.086	.175	.375	.320	.923	.389	.000
	N	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC5	Pearson Correlation	.207*	.307**	.123	.259**	1	.328**	.153	.090	.208*	.158	.024	.555**
	Sig. (2-tailed)	.031	.001	.202	.006		.000	.112	.350	.030	.101	.801	.000
	N	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC6	Pearson Correlation	.117	.206*	.061	.165	.328**	1	.211*	.031	.215*	.137	.141	.511**
	Sig. (2-tailed)	.227	.031	.528	.086	.000		.028	.746	.025	.155	.143	.000
	N	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC7	Pearson Correlation	.180	-.038	-.070	.131	.153	.211*	1	.285**	.021	.185	.015	.387**
	Sig. (2-tailed)	.062	.697	.471	.175	.112	.028		.003	.828	.055	.877	.000
	N	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC8	Pearson Correlation	.151	.221*	-.068	.086	.090	.031	.285**	1	.176	.013	.119	.414**
	Sig. (2-tailed)	.117	.021	.479	.375	.350	.746	.003		.068	.892	.217	.000
	N	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC9	Pearson Correlation	.116	.247**	.080	.096	.208*	.215*	.021	.176	1	.054	.220*	.483**
	Sig. (2-tailed)	.230	.010	.406	.320	.030	.025	.828	.068		.579	.022	.000

N		109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC10	Pearson Correlation	-.021	.062	-.041	-.009	.158	.137	.185	.013	.054	1	.464**	.400**
	Sig. (2-tailed)	.829	.524	.674	.923	.101	.155	.055	.892	.579		.000	.000
N		109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC11	Pearson Correlation	-.057	.011	.071	.083	.024	.141	.015	.119	.220*	.464**	1	.437**
	Sig. (2-tailed)	.554	.907	.464	.389	.801	.143	.877	.217	.022	.000		.000
N		109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
NTC	Pearson Correlation	.413**	.539**	.376**	.516**	.555**	.511**	.387**	.414**	.483**	.400**	.437**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N		109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.620	11

Tabel 4.7
Hasil Pengujian *Homogeneity of Variance*
Levene's Test of Equality of Error Variances^a

Dependent Variable:NTC

F	df1	df2	Sig.
1.543	4	104	.195

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + TK + G + TK * G

Tabel 4.8
 Hasil Pengujian ANOVA

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:NTC

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	27.232 ^a	4	6.808	17.336	.000
Intercept	321.205	1	321.205	817.903	.000
TK	9.595	2	4.797	12.216	.000
G	2.316	1	2.316	5.897	.017
TK * G	.819	1	.819	2.085	.152
Error	40.843	104	.393		
Total	1325.273	109			
Corrected Total	68.075	108			

a. R Squared = ,400 (Adjusted R Squared = ,377)

Tabel 4.9
Kuesioner Penelitian

No.	Pernyataan	Nilai
1	Jika ada pekerjaan yang dibayar tunai (tanpa struk/bukti) maka tidak perlu membayar pajaknya.	
2	Salah satu akibat dari Self Assessment System adalah adanya pengembalian pajak (perhitungan WP berlebih sehingga ada pajak yang dikembalikan). Dengan demikian, tidaklah salah apabila memperkecil jumlah pajak terutang yang dibayar.	
3	Peluang seorang WP diperiksa sangatlah kecil, maka tidak menjadi masalah apabila WP sedikit memperkecil jumlah pajak terutangnya.	
4	Saya adalah seorang yang sangat peduli dengan hukum, namun apabila ada kesempatan wajar jika saya memperkecil jumlah penghasilan saya atau mengakui pengeluaran yang seharusnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan agar pajak yang dibayar lebih kecil.	
5	Walaupun WP secara tidak sengaja tidak melaporkan suatu penghasilan, DJP pun tidak akan mengetahuinya.	
6	Karena tarif pajak dinilai cukup tinggi, maka memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayar bukanlah merupakan suatu pencurian uang negara.	
7	Ketika ada pengeluaran yang tidak tahu hendak digolongkan	

	ke kelompok pengeluaran yang mana, maka kelompokkan saja ke dalam pengeluaran yang dapat menjadi pengurang penghasilan, dimana kelompok pengeluaran tersebut sulit ditelusuri oleh DJP.	
8	Laporkan semua penghasilan utama, kecuali untuk penghasilan dari usaha sampingan (bukan usaha inti).	
9	Memperkecil penghasilan adalah dibenarkan, karena hal tersebut tidak akan merugikan siapapun.	
10	Biaya untuk menjalankan usaha saat ini sangat besar, sehingga wajar apabila kita mengakui jumlah pengeluaran yang besar sebagai pengurang penghasilan agar pajak yang dibayar tidak terlalu tinggi.	
11	Apabila kita meragukan suatu pengeluaran dapat menjadi pengurang penghasilan, maka di benarkan untuk memutuskan pengeluaran tersebut menjadi pengurang penghasilan.	

Sumber: Kasipillai and H. A. Jabbar (2006)